

## PEMETAAN PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN EMKM PADA UMKM DI KOTA TANGERANG SELATAN

**Yananto Mihadi Putra**

*yananto.mihadi@mercubuana.ac.id*

*Universitas Mercu Buana*

### **ABSTRACT**

*Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are proven to have stimulated and stimulated national economic growth on an ongoing basis. Data from the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (Kemenkop and UMKM) shows that 97% of employment is provided by MSMEs, contributing significantly to reducing unemployment in Indonesia. Seeing this important role, it requires support from all parties to develop and realize advanced, independent and modern MSMEs. This study aims to map MSMEs that have made Financial Statements in accordance with SAK EMKM and prove the effectiveness of SAK EMKM. Thus, MSMEs can make the transition from financial reporting based on cash to financial reporting on an accrual basis. The results of this study indicate that the perception of the MSMEs owner or manager considers the importance of understanding the SAK EMKM. However, 80.4% (majority) of MSMEs in South Tangerang City have not implemented the SAK EMKM in their financial statements. This happened due to several obstacles faced by the owners or managers of MSMEs in South Tangerang City in recording financial statements.*

**Keywords:** *annual report, small medium enterprise, accounting standar for MSME.*

### **ABSTRAK**

*Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terbukti telah mendorong dan merangsang pertumbuhan ekonomi nasional secara berkesinambungan. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop dan UMKM) menunjukkan bahwa 97% lapangan kerja diberikan oleh UMKM sehingga berkontribusi signifikan mengurangi pengangguran di Indonesia. Melihat peran penting tersebut, maka dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk mengembangkan dan mewujudkan UMKM yang maju, mandiri, dan modern. Penelitian ini bertujuan untuk pemetaan UMKM yang telah membuat Laporan Keuangan sesuai dengan SAK EMKM dan pembuktian efektifitas SAK EMKM tersebut. Dengan demikian UMKM dapat dalam melakukan transisi dari pelaporan keuangan yang berdasar kas ke pelaporan keuangan dengan dasar akrual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi pemilik ataupun pengelola UMKM menganggap pentingnya pemahaman tentang SAK EMKM. Namun demikian, 80,4% (mayoritas) UMKM di Kota Tangerang Selatan belum melakukan penerapan SAK EMKM pada laporan keuangannya. Hal ini terjadi dikarenakan adanya beberapa kendala yang dihadapi oleh pemilik ataupun pengelola UMKM di Kota Tangerang Selatan dalam mencatat laporan keuangan.*

**Kata kunci:** *laporan tahunan, usaha kecil menengah, standar akuntansi untuk UMKM.*

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang dikenal dengan istilah UMKM diakui sebagai salah satu penyumbang kontribusi yang nyata bagi perekonomian nasional Indonesia, selain itu UMKM juga disebut sebagai salah satu penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap pertumbuhan ekonomi domestik mencapai 60 persen. Bahkan sektor UMKM menyerap 97 persen tenaga kerja produktif Indonesia dan berperan sebagai penyangga ekonomi nasional di saat krisis (IAI, 2016).

Dukungan akan pengembangan UMKM di daerah diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menumbuhkan lapangan pekerjaan, dapat mengembangkan ekonomi kerakyatan dan pada akhirnya bisa mensejahterakan masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Kota Tangerang Selatan.

Untuk pertumbuhan perkembangan UMKM, Pemerintah setempat pun pernah mengeluarkan kebijakan, yakni memberikan secara gratis sertifikat tanah dan merk Harta Karya Intelektual (HAKI) kepada 50 pelaku UMKM di Kota Tangerang Selatan. Kebijakan ini sangat membantu pelaku UMKM untuk mendapat kemudahan akses modal usaha atau kredit usaha dari bank. Keberlanjutan kebijakan sangat diperlukan agar program tidak berhenti di tengah jalan. Mengingat belum berkembangnya potensi UMKM diantaranya dikarenakan terkendala masalah akses modal kerja atau kredit usaha, deregulasi, manajemen usaha dan administrasi serta kontinuitas pasokan bahan baku.

Menurut data yang diperoleh dari Dinas KUMKM Kota Tangerang Selatan, jumlah UMKM yang berada di Kota Tangerang Selatan adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Data Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan**

No	Kecamatan	Sektor				Total	Ket
		Perdagangan	Aneka Usaha	Industri Pertanian	Industri Non Pertanian		
a.	Serpong	543	73	96	216	928	-
b.	Serpong Utara	393	80	108	295	876	-
c.	Pamulang	253	55	60	194	562	-
d.	Ciputat	356	65	111	196	728	-
e.	Ciputat Timur	667	58	113	148	986	-
f.	Pondok Aren	416	53	112	155	736	-
		7.045	911	1.856	2.868	12.800	

Dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah UMKM : 12.800 di Kota Tangerang Selatan  
- Usaha Mikro : 4.893 unit  
- Usaha Kecil : 7.335 unit  
- Usaha Menengah : 632 unit

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan tahun 2017

Namun demikian, mayoritas entitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia sulit mendapatkan akses ke perbankan dan sumber pendanaan lainnya. Kondisi ini terjadi karena UMKM tidak memiliki laporan keuangan yang memadai dan sesuai standar yang berlaku di industri keuangan (IAI, 2016).

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Standar Akuntansi Keuangan**

Standar Akuntansi keuangan (SAK) merupakan ketentuan yang mengatur entitas bisnis untuk menyusun laporan keuangan. Indonesia telah memiliki sendiri standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Prinsip atau standar akuntansi yang secara umum dipakai di Indonesia disusun dan dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). IAI sendiri adalah organisasi profesi akuntan yang ada di Indonesia. IAI didirikan pada tahun 1957 selain mewadahi para akuntan juga memiliki peran yang lebih besar dalam dunia akuntansi di Indonesia. Peran tersebut adalah peran dalam rangka penyusunan standar akuntansi. Standar akuntansi tersebut merupakan seperangkat standar yang mengatur tentang pelaksanaan akuntansi di dunia bisnis Indonesia (Cahyono, 2011).

SAK yang dijadikan pedoman dalam penyajian laporan keuangan mengatur dua hal, yaitu standar pengukuran dan standar pengungkapan. Standar pengukuran mengatur tentang bagaimana mengukur transaksi yang terjadi. Standar pengungkapan mengatur tentang apa dan bagaimana suatu kejadian, transaksi, maupun informasi keuangan harus diungkapkan supaya tidak menyesatkan bagi pemakai laporan keuangan (Wahdini dan Suhairi, 2006).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum, menjelaskan bahwa Standar Akuntansi Keuangan, yang selanjutnya disingkat SAK, adalah prinsip akuntansi Indonesia dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan suatu entitas usaha.

### **Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM)**

Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) tahun 2018 yang diterbitkan oleh IAI pada bab 1, paragraf 1 dijelaskan bahwa Standar Akuntansi Keuangan untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Selanjutnya dalam bab 1 paragraf 2 SAK EMKM, dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya selama dua tahun berturut-turut.

Pada bab 1 paragraf 3 dijelaskan juga bahwa SAK EMKM dapat digunakan oleh entitas yang tidak memenuhi definisi dan kriteria dalam paragraf 1.2, jika otoritas

mengizinkan entitas tersebut untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan SAK EMKM.

### **Laporan Keuangan**

Berdasarkan Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) paragraf 7, yang dimaksud laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara seperti, misalnya sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Di samping itu juga termasuk skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut, misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh perubahan harga.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dalam PSAK (2007, hal 7), laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan berfungsi tidak hanya sebagai alat pengujian saja, tetapi dapat juga digunakan sebagai dasar untuk menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan. Berdasarkan analisis dalam laporan keuangan, maka dengan adanya laporan keuangan dapat membantu pihak yang berkepentingan dalam mengambil suatu keputusan. Jadi apabila ingin mengetahui kondisi keuangan suatu perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan, maka perlu adanya dibuat laporan keuangan.

### **Tujuan Laporan Keuangan**

Menurut SAK UMKM tahun 2018 tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tersebut. Pengguna tersebut meliputi penyedia sumber daya bagi entitas seperti kreditor maupun investor. Dalam memenuhi tujuannya, laporan keuangan juga menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

### **Posisi Keuangan**

Informasi posisi keuangan entitas menurut SAK UMKM tahun 2018 terdiri dari informasi mengenai aset, liabilitas, dan ekuitas entitas pada tanggal tertentu, dan disajikan dalam laporan posisi keuangan. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut: (a) Aset adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan yang dari mana manfaat ekonomi di masa depan diharapkan akan diperoleh oleh entitas. (b) Liabilitas adalah kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang penyelesaiannya mengakibatkan arus

keluar dari sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. (c) Ekuitas adalah hak residual atas aset entitas setelah dikurangi seluruh liabilitasnya.

### **Kinerja**

Informasi kinerja keuangan entitas terdiri dari informasi mengenai penghasilan dan beban selama periode pelaporan, dan disajikan dalam laporan laba rugi. Unsur-unsur tersebut didefinisikan sebagai berikut: (a) Penghasilan (*income*) adalah kenaikan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas masuk atau kenaikan aset, atau penurunan liabilitas yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanam modal. (b) Beban (*expenses*) adalah penurunan manfaat ekonomi selama periode pelaporan dalam bentuk arus kas keluar atau penurunan aset, atau kenaikan liabilitas yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak disebabkan oleh distribusi kepada penanam modal.

### **Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan**

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu akun dalam laporan posisi keuangan atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur sebagaimana diuraikan dalam SAK EMKM paragraf 2.2 dan 2.8, dan memenuhi kriteria sebagai berikut: (a) manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut dapat dipastikan akan mengalir ke dalam atau keluar dari entitas; dan (b) akun tersebut memiliki biaya yang dapat diukur dengan andal.

### **Pengukuran Unsur-Unsur Laporan Keuangan**

Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengakui aset, liabilitas, penghasilan, dan beban di dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM adalah biaya historis. Biaya historis suatu aset adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Biaya historis suatu liabilitas adalah sebesar jumlah kas atau setara kas yang diterima atau jumlah kas yang diperkirakan akan dibayarkan untuk memenuhi liabilitas dalam pelaksanaan usaha normal.

### **Materialitas**

Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya. Kelalaian untuk mencantumkan (*omission*) atau kesalahan dalam mencatat (*misstatement*) akun-akun laporan keuangan adalah material jika, baik secara sendiri maupun bersama, dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna laporan keuangan. Materialitas bergantung pada ukuran dan sifat dari kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat tersebut dengan memperhatikan keadaan terkait. Ukuran atau sifat dari pos laporan keuangan atau gabungan dari keduanya dapat menjadi faktor penentu.

### **Prinsip Pengakuan Dan Pengukuran Pervasif**

Persyaratan untuk pengakuan dan pengukuran aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dalam SAK EMKM didasarkan pada konsep dan prinsip pervasif dari *Rerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan*. Dalam hal tidak ada suatu pengaturan tertentu dalam SAK EMKM untuk transaksi atau peristiwa lain, maka entitas mempertimbangkan definisi, kriteria pengakuan dan konsep pengukuran untuk aset, liabilitas, penghasilan, dan beban.

## **Asumsi Dasar**

### **1. Dasar Akrua**

Entitas menyusun laporan keuangan dengan menggunakan dasar akrua. Dalam dasar akrua, akun-akun diakui sebagai aset, liabilitas, ekuitas, penghasilan, dan beban ketika memenuhi definisi dan kriteria pengakuan untuk masing-masing akun-akun tersebut.

### **2. Kelangsungan Usaha**

Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen menggunakan SAK EMKM dalam membuat penilaian atas kemampuan entitas untuk melanjutkan usahanya di masa depan (kelangsungan usaha). Entitas mempunyai kelangsungan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas tersebut atau menghentikan operasi atau tidak mempunyai alternatif realistis kecuali melakukan hal-hal tersebut. Jika entitas tidak menyusun laporan keuangan berdasarkan asumsi kelangsungan usaha, maka entitas mengungkapkan fakta mengapa entitas tidak mempunyai kelangsungan usaha.

### **3. Konsep Entitas Bisnis**

Entitas menyusun laporan keuangan berdasarkan konsep entitas bisnis. Entitas bisnis, baik yang merupakan usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, maupun badan usaha yang berbadan hukum, harus dapat dipisahkan secara jelas dengan pemilik bisnis tersebut maupun dengan entitas-entitas lainnya. Transaksi yang berkaitan dengan bisnis tersebut harus dapat dipisahkan dari transaksi pemilik bisnis tersebut, maupun dari transaksi entitas lainnya.

### **Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 20 Tahun 2008 pada bab 1, pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah adalah: a) usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, b) usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdirisendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. c) usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Usaha Mikro, Kecil, Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan (UU No 20 Tahun 2008, bab 2, pasal 3).

### **Persepsi Pengelola Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Pengertian mengenai persepsi manusia dalam kamus Webster (1977) dalam Harisah dan Masiming (2008) menyatakan bahwa *perception* adalah kegiatan merasakan atau kemampuan untuk merasakan, memahami jiwa dari objek-objek, kualitas dan lain-lain melalui pemaknaan rasa, kesadaran, perbandingan; pengetahuan yang dalam, intuisi ataupun kemampuan panca indera dalam memahami sesuatu; pengertian, pengetahuan dan lain-lain yang diterima dengan cara merasakan, atau ide khusus, konsep, kesan dan lain-lain yang terbentuk.

Persepsi menurut Jalaludin (1998) dalam Hadiwijaya (2011) adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Menurut Schiffman dan Kanuk (2010) dalam Rudiantoro dan Siregar (2011), persepsi merupakan suatu proses dari individu dalam memilih, mengelola, dan menginterpretasikan suatu rangsangan yang diterimanya ke dalam suatu penilaian terkait apa yang ada di sekitarnya. Jadi persepsi merupakan suatu titik awal bagi seseorang untuk melakukan sesuatu hal, termasuk dalam membuat pembukuan dan pelaporan keuangan. Berdasarkan persepsi akan pentingnya pembukuan dan pelaporan keuangan, maka akan mendorong pengusaha UMKM untuk melakukan pelaporan keuangan.

## **METODE**

### **Desain Penelitian**

Objek penelitian ini adalah UMKM yang berdomisili di Kota Tangerang Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan suatu studi deskriptif (*descriptive study*), dan studi fenomenologi (*fenomonology study*). Pengertian studi deskriptif menurut Augustine dan Kristaung (2013) yaitu suatu penelitian kualitatif yang hanya menggambarkan satu paramater tertentu tanpa mempermasalahkan apa, bagaimana, dan mengapa hal tersebut terjadi. Jadi penelitian ini hanya memotret fakta apa adanya, kemudian disajikan sebagai sebuah laporan penelitian yang memakai prosedur dan standar keilmuan tertentu.

Sedangkan pengertian studi fenomenologi menurut Augustine dan Kristaung (2013) yaitu pencarian data dan interpretasi data dari sejumlah informan yang menjadi sumber wawancara yang mengalami secara riil tentang fenomena yang sedang diteliti. Penelitian dengan studi deskriptif dan studi fenomenologi sesuai dengan permasalahan yang penulis rumuskan dalam penelitian ini, karena mendeskripsikan mengenai pencatatan laporan keuangan UMKM di Kota Tangerang Selatan yang bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pencatatan keuangan UMKM di Kota Tangerang Selatan terhadap SAK EMKM, kemudian melakukan penyebaran kuesioner secara langsung terhadap pemilik UMKM di Kota Tangerang Selatan terhadap pencatatan keuangan.

### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini UMKM di Kota Tangerang Selatan tahun 2017. Penentuan sampel dilakukan dengan metode *purpovise judgement sampling* yaitu penentuan secara tidak acak (non probabilitas) yang informasinya diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Kriteria penentuan sampel adalah UMKM

yang terdaftar yang terdaftar di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinas KUKM) Kota Tangerang Selatan tahun 2017 dan UMKM yang bergerak di sektor aneka usaha.

**Tabel 2. Data Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan**

No	Kecamatan	Sektor				Total	Ket
		Perdagangan	Aneka Usaha	Industri Pertanian	Industri Non Pertanian		
a.	Serpong	543	73	96	216	928	-
b.	Serpong Utara	393	80	108	295	876	-
c.	Pamulang	253	55	60	194	562	-
d.	Ciputat	356	65	111	196	728	-
e.	Ciputat Timur	667	58	113	148	986	-
f.	Pondok Aren	416	53	112	155	736	-
		7.045	911	1.856	2.868	12.800	

Dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah UMKM : 12.800 di Kota Tangerang Selatan  
- Usaha Mikro : 4.893 unit  
- Usaha Kecil : 7.335 unit  
- Usaha Menengah : 632 unit

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan tahun 2017

Berdasarkan kriteria pemilihan sampel di atas, maka jumlah sampel penelitian adalah 911 sektor aneka usaha.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Penulisan ini menggunakan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan penyebaran kuesioner pada responden dan data sekunder diperoleh dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinas KUMKM) Kota Tangerang Selatan serta studi literatur.

### **Metode Analisis**

Analisis terhadap pengecualian dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar dengan pengecualian dilakukan dengan menggunakan *content analysis*. *Content analysis* adalah teknik sistematis dalam mengkategorikan kata menjadi kategori isi/muatan dengan menggunakan aturan pengkodean tertentu (Churyk, *et al.* 2008). Menurut Palmquist, Mike. *et al* (1994 - 2012), secara umum ada dua tipe *content analysis* yaitu *conceptual analysis* dan *relational analysis*. Namun, secara tradisional *conceptual analysis* merupakan tipe *content analysis* yang paling sering digunakan. *Conceptual analysis* dapat digunakan untuk menentukan keberadaan dan frekuensi dari konsep yang ditampilkan dalam kata yang paling sering muncul dalam sebuah teks, dengan demikian dapat ditentukan berapa kali kata tersebut muncul.

Palmquist, Mike. *et all* (1994 - 2012) menjelaskan langkah-langkah dalam *conceptual analysis* yang kemudian diimplementasikan dalam penelitian ini: 1) Menentukan level analisis 2) Menentukan berapa jenis konsep yang digunakan sebagai kode, 3) Menentukan apakah kode dilakukan untuk eksistensi atau frekuensi dari konsep, 4) Menentukan bagaimana membedakan diantara konsep, 5) Menjelaskan aturan dalam pengkodean, 6) Menentukan apa yang akan dilakukan dengan informasi yang tidak relevan, 7) Mengkodekan teks, 8) Menganalisis hasil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Partisipan

Tabel 3 menyajikan deskripsi sampel dalam penelitian ini, yang meliputi UMKM yang terdaftar di Kota Tangerang Selatan pada tahun 2017.

**Tabel 3. Data Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang Selatan**

No	Kecamatan	Sektor				Total	Ket
		Perdagangan	Aneka Usaha	Industri Pertanian	Industri Non Pertanian		
a.	Serpong	543	73	96	216	928	-
b.	Serpong Utara	393	80	108	295	876	-
c.	Pamulang	253	55	60	194	562	-
d.	Ciputat	356	65	111	196	728	-
e.	Ciputat Timur	667	58	113	148	986	-
f.	Pondok Aren	416	53	112	155	736	-
		7.045	911	1.856	2.868	12.800	

Dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah UMKM : 12.800 di Kota Tangerang Selatan

- Usaha Mikro : 4.893 unit

- Usaha Kecil : 7.335 unit

- Usaha Menengah : 632 unit

Sumber: Dinas Koperasi dan UMKM Kota Tangerang Selatan tahun 2017

Dalam penelitian ini menggunakan 911 (sembilan ratus sebelas) UMKM sektor aneka usaha yang tersebar di 6 (enam) kecamatan.

### Demografi Responden

Berdasarkan hasil pengolahan data, berikut ini disajikan demografi responden terkait dengan Pemetaan UMKM di Kota Tangerang Selatan:

### Pemetaan Pengelola UMKM berdasarkan Jenis Kelamin

Dari gambar 1 hasil pengolahan data responden penelitian diketahui berdasarkan jenis kelamin pemilik dan/atau pengelola UMKM, bahwa jumlah pemilik dan/atau pengelola UMKM didominasi oleh jenis kelamin perempuan sebesar 64,4% sedangkan 35,6% pemilik dan/atau pengelola UMKM adalah laki-laki.

**Gambar 1. Pemetaan Pengelola UMKM berdasarkan Jenis Kelamin**

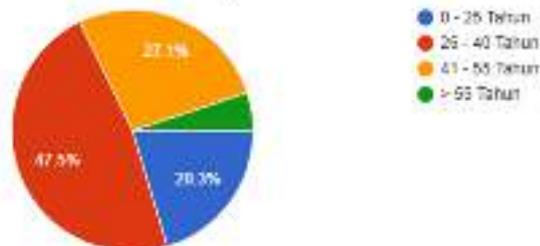


Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2017

### **Pemetaan Pengelola UMKM berdasarkan Usia**

Dari gambar 2 hasil pengolahan data responden penelitian diketahui berdasarkan kategori usia pemilik dan/atau pengelola UMKM, bahwa usia pemilik dan/atau pengelola UMKM didominasi oleh usia 47,5% yang berusia 26-40 tahun, kemudian 27,1% berusia 41-55 tahun, usia 0-25 tahun sebesar 20,3% dan sisanya 5,1% berusia diatas 55 tahun. Dengan dominasi usia 26-40 tahun, pengelolaan UMKM di Kota Tangerang Selatan akan mengalami peningkatan kualitas pertumbuhan yang cukup baik.

**Gambar 2. Pemetaan Pengelola UMKM berdasarkan Usia**

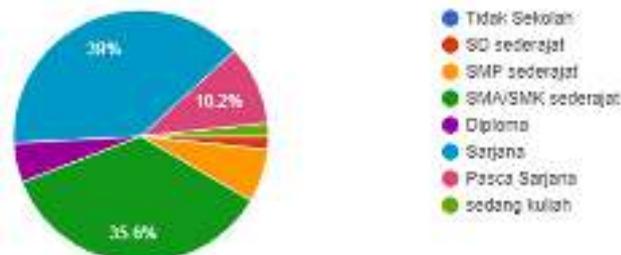


Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2017

### **Pemetaan Pengelola UMKM berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

Dari gambar 3, hasil pengolahan data responden penelitian diketahui berdasarkan kategori latar belakang pendidikan terakhir pemilik dan/atau pengelola UMKM, bahwa latar belakang pendidikan pemilik dan/atau pengelola UMKM didominasi oleh Pendidikan Sarjana sebesar 39%, Pendidikan SMA/SMK sederajat sebesar 35,6%, Pasca Sarjana sebesar 10,2%, Pendidikan SMP sebesar 6,8%, Pendidikan Diploma 5,1%, Pendidikan SD sebesar 1,7%, dan sedang kuliah sebesar 1,7%.

**Gambar 3. Pemetaan Pengelola UMKM berdasarkan Latar Belakang Pendidikan**

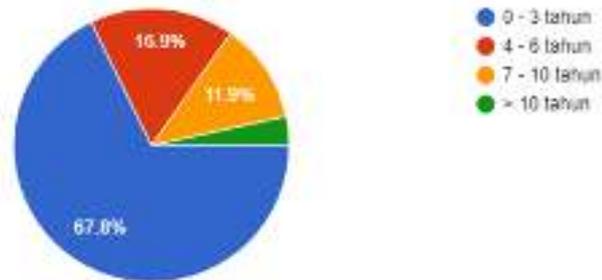


Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2017

### Pemetaan Pengelola UMKM berdasarkan Lama Usaha

Dari gambar 4, hasil pengolahan data responden penelitian diketahui berdasarkan kategori lamanya aktifitas usaha UMKM, bahwa mayoritas UMKM berusia 0-3 tahun atau usaha baru sebesar 67,8%, UMKM berusia 4-6 tahun sebesar 16,9%, UMKM berusia 7-10 tahun sebesar 11,9% dan 3,4% UMKM berusia lebih dari 10 tahun. Dengan demikian mayoritas UMKM di Kota Tangerang Selatan merupakan usaha baru.

Gambar 4. Pemetaan Pengelola UMKM berdasarkan Lama Usaha

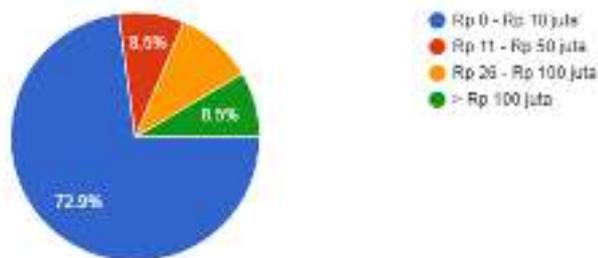


Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2017

### Pemetaan Pengelola UMKM berdasarkan Nilai Omzet Usaha

Dari gambar 5, hasil pengolahan data responden penelitian diketahui berdasarkan kategori nilai omzet UMKM, bahwa mayoritas UMKM memiliki omzet antara Rp0-Rp10 juta sebesar 72,9%, UMKM yang memiliki omzet antara Rp26-Rp100 juta sebesar 10,2%, UMKM yang memiliki omzet Rp11-Rp50 juta sebesar 8,5% dan UMKM yang memiliki omzet diatas Rp100 juta sebesar 8,5%. Dengan demikian berdasarkan nilai omzet UMKM bahwa mayoritas UMKM di Kota Tangerang Selatan masih memiliki omzet yang cukup minim.

Gambar 5. Pemetaan Pengelola UMKM berdasarkan Nilai Omzet Usaha



Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2017

### **Pemahaman Responden pada SAK EMKM Pemetaan Pemahaman Pengelola UMKM berdasarkan Pernah atau Tidaknya Mendapatkan Sosialisasi SAK EMKM**

**Gambar 6. Pemetaan Pemahaman Pengelola UMKM berdasarkan Pernah atau Tidaknya Mendapatkan Sosialisasi SAK EMKM**

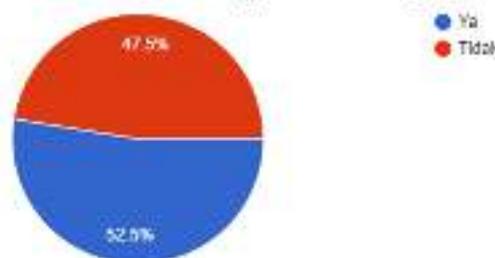


Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2017

Dari gambar 6, hasil pengolahan data responden penelitian pernah tidaknya pemilik ataupun pengelola UMKM mendapatkan sosialisasi tentang SAK EMKM, bahwa mayoritas pemilik ataupun pengelola UMKM belum pernah mendapatkan sosialisasi SAK EMKM dengan nilai 74,6% sedangkan 25,4% pengelola/pemilik UMKM sudah pernah mendapatkan sosialisasi. Berdasarkan hasil penilaian tersebut, perlu diaktifkan lagi sosialisasi tentang penerapan SAK EMKM pada UMKM sgsr pemilik ataupun pengelola UMKM lebih memahami bagaimana pelaporan keuangan UMKM yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan, khususnya SAK EMKM.

### **Pemetaan Pemahaman Pengelola UMKM berdasarkan Implementasi Pembuatan Laporan Keuangan**

**Gambar 7. Pemetaan Pemahaman Pengelola UMKM berdasarkan Implementasi Pembuatan Laporan Keuangan**

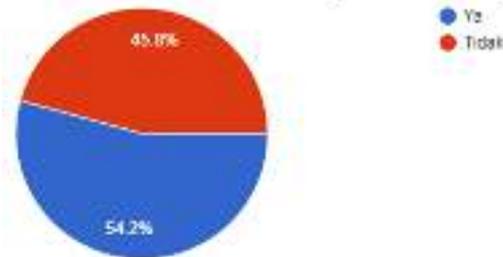


Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2017

Dari gambar 7, hasil pengolahan data responden tentang penerapan/implementasi pembuatan laporan keuangan oleh pemilik ataupun pengelola UMKM, bahwa mayoritas pemilik ataupun pengelola UMKM melakukan pencatatan atau membukukan transaksi yang terjadi pada usaha yang dilakukannya. Hal ini tercermin pada hasil data responden sebesar 52,5% menyatakan YA ketika ditanya apakah melakukan pencatatan atas aktifitas transaksi perusahaan. Sedangkan 47,5% sisanya tidak melakukan pencatatan atas transaksi yang terjadi pada perusahaan.

## Pemetaan Pemahaman Pengelola UMKM berdasarkan Keinginan Kontinuitas Pencatatan Laporan Keuangan

**Gambar 8. Pemetaan Pemahaman Pengelola UMKM berdasarkan Keinginan Kontinuitas Pencatatan Laporan Keuangan**

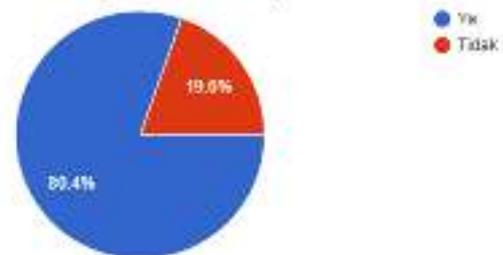


Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2017

Gambar 8, merupakan gambaran hasil pengolahan data responden tentang keberlanjutan/kontinuitas pembuatan laporan keuangan oleh pemilik ataupun pengelola UMKM. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa mayoritas pemilik ataupun pengelola UMKM telah melakukan pencacatan atau membukukan transaksi yang terjadi pada usaha yang dilakukannya secara rutin. Hal ini tercermin pada hasil data responden sebesar 54,2% menyatakan YA ketika ditanya apakah Pemilik ataupun pengelola UMKM telah melakukan pencatatan secara rutin atas aktifitas transaksi perusahaan, walaupun secara sederhana. Sedangkan 45,8% sisanya tidak melakukan pencatatan secara rutin atas transaksi yang terjadi pada perusahaan.

## Pemetaan Pemahaman Pengelola UMKM berdasarkan Keinginan untuk Mencatat Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM

**Gambar 9. Pemetaan Pemahaman Pengelola UMKM berdasarkan Keinginan untuk Mencatat Laporan Keuangan Sesuai SAK EMKM**



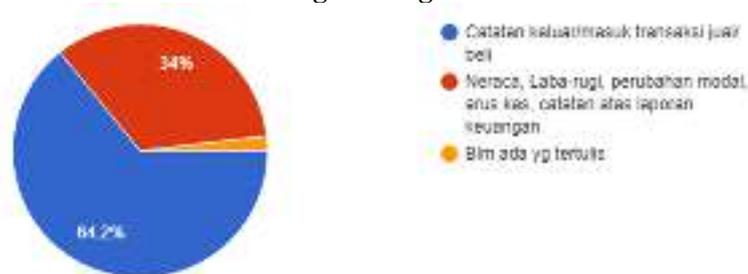
Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2017

Gambar 9, merupakan gambaran hasil pengolahan data responden tentang keinginan pemilik ataupun pengelola UMKM untuk mencatat Laporan Keuangan sesuai dengan SAK EMKM. Dari hasil tersebut diperoleh bahwa mayoritas pemilik ataupun pengelola UMKM berkeinginan untuk mencatat Laporan Keuangan sesuai dengan SAK EMKM atas transaksi yang terjadi pada usaha yang dilakukannya. Hal ini tercermin pada hasil data responden sebesar 80,4% menyatakan YA ketika ditanya apakah Pemilik ataupun pengelola UMKM berkeinginan untuk mencatat Laporan Keuangan sesuai dengan SAK EMKM atas transaksi yang terjadi pada usaha yang dilakukannya. Sedangkan 19,6% sisanya tidak bekeinginan untuk

melakukan pencatatan secara sesuai dengan SAK EMKM atas transaksi yang terjadi pada perusahaan.

### **Pemetaan Pemahaman Pengelola UMKM berdasarkan Jenis Laporan Keuangan Yang Dibuat**

**Gambar 10. Pemetaan Pemahaman Pengelola UMKM berdasarkan Jenis Laporan Keuangan Yang Dibuat**



Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2017

Gambar 10, merupakan gambaran Pemahaman Pengelola UMKM di Kota Tangerang Selatan berdasarkan Jenis Laporan Keuangan Yang Dibuat. Hasil penelitian mencerminkan jenis laporan keuangan yang sudah/atau pernah dibuat oleh responden. Sebesar 64,2% responden hanya membuat catatan keluar/masuk atas transaksi jual beli yang dilakukan, 34% responden sudah membuat laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laba rugi, perubahan modal, arus kas dan catatan atas laporan keuangan, sedangkan 1,9% sisanya belum membuat laporan keuangan secara tertulis.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Setelah melakukan pengamatan dan melakukan analisis data penelitian yang telah disajikan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1). Persepsi pemilik ataupun pengelola UMKM di Kota Tangerang Selatan mengenai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), yaitu Pemilik ataupun pengelola UMKM menganggap pentingnya pemahaman tentang SAK EMKM, hal ini tercermin pada hasil penelitian yang menunjukkan bahwa 74,6% pemilik ataupun pengelola UMKM belum pernah mendapatkan sosialisasi tentang SAK EMKM sehingga menginginkan adanya sosialisasi secara berkelanjutan mengenai SAK EMKM tersebut; 2). Dari hasil pengamatan dan survei kepada pemilik ataupun pengelola UMKM, bahwa saat ini mayoritas (80,4%) UMKM di Kota Tangerang Selatan belum melakukan penerapan SAK EMKM pada laporan keuangannya; 3). Kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Tangerang Selatan diantaranya usia pemilik ataupun pengelola UMKM, latar belakang pendidikan dari pemilik ataupun pengelola UMKM, jumlah aktifitas transaksi yang dimiliki UMKM, sumber daya manusia yang memahami pelaporan keuangan untuk UMKM dan kurangnya sosialisasi tentang SAK EMKM yang diperuntukkan bagi UMKM.

### **Keterbatasan Penelitian**

Penelitian ini hanya melakukan pemetaan pengguna Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah yang diperuntukkan bagi UMKM untuk menyusun laporan keuangannya.

### **Implikasi Penelitian**

Terlepas dari berbagai keterbatasan yang ada, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat Dinas UMKM usebagai masukan untuk melakukan sosialisasi penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan. Hal ini dikarenakan dengan adanya pengetahuan pemilik ataupun pengelola UMKM untuk membuat laporan keuangan sesuai dengan SAK EMKM, pemilik UMK dapat mengetahui kinerja dari usaha yang telah dijalankan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Alifta Lutfiaazahra, 2015. Implementasi Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada UMKM Pengrajin Batik di Kampongeng Batik Laweyan Surakarta. Prosiding Semiar Nasional Pendidikan Ekonomi & Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. ISBN: 978-602-8580-19-9.
- Arikunto, S. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Augustine, Y; R. Kristaung. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis dan Akuntansi*. Jakarta: Dian Rakyat.
- Cahyono, A. T. 2011. Meta Teori Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia Menuju Konvergensi SAK di Masa Globalisasi. *Jurnal Eksis*. 7: 2.
- Harisah, A; Z. Masiming. 2008. Persepsi Manusia terhadap Tanda, Simbol dan Spasial. *Jurnal SMARTek*. 6: 1.
- Harnovinsah, H., dan Alamsyah, S. 2017. The Mediation Influence of Value Relevance of Accounting Information, Investment Decision And Dividend Policy On The Relationship Between Profitability And The Company's Value. *Jurnal Akuntansi*, 21(2), 170-183.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Pedoman Standar Akuntansi Keuangan No. 01 Revisi 2009.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK). 23 September 2012.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2018. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah, IAI: Jakarta.

- Montero, P.M; I. A. Lozano; J. T. Quiros; E. P. Calderon. 2010. Accounting Standards for Small and Medium-Sized Entities Evidence from Spain. *Contaduriay Administracion*. 235.
- Muhammad Zidni Ilman Riadi, 2017. Penerapan Laporan Keuangan Berbasis Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM) pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Woofit Konveksi. *Jurnal Kajian Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi (Kiafe) Untan*. Vol 6, No 2 (2017).
- Mujiyana; L. Sularto; M.A. Mukhyi. 2012. Pengaruh Penerapan Periklanan di Internet dan Pemasaran Melalui E-Mail Produk UMKM di Wilayah Depok. *J@TI UNDIP*. 7:3.
- Ni Putu Octavia Anggraini Darmayanti. *E6t. al.*, 2017. Implementasi Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-ETAP dan Penilaian Kinerja pada UMKM Pengrajin Endek Mastuli “Ayu Lestari” di Desa Kalianget Kecamatan Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program SI* (Vol: 7 No: 1 Tahun 2017).
- Peraturan Menteri Keuangan No. 76 Tahun 2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum.
- Probowati, P.T. 2011. Reproduksi Masyarakat dan Implikasi Spasial dalam Proses Transformasi Kampung Laweyan. *Tesis*. Jakarta: Departemen Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Indonesia.
- Rachmawati, S. D., dan Fardinal. 2017. Pengaruh Aktivitas Pengendalian, Informasi dan Komunikasi terhadap Kualitas Sistem Informasi Akuntansi dan Dampaknya terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia). *Profita*, 10(3), 426-437.
- Rudiantoro, R; S.V. Siregar. 2011. Kualitas Laporan Keuangan UMKM serta Prospek Implementasi SAK ETAP. *Simposium Nasional Akuntansi XIV Aceh*. Universitas Indonesia.
- Sriyana, J. 2010. Strategi Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM): Studi Kasus di Kabupaten Bantul. *Simposium Nasional*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

Wahdini; Suhairi. 2006. Persepsi Akuntan terhadap Overload Standar Akuntansi Keuangan (SAK) bagi Usaha Kecil dan Menengah. *Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang*.

Widyaningrum, D.E. 2012. Strategi Pemasaran Kampung Batik Laweyan Solo. *Tesis*. Jakarta: Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Wulanditya, P. 2011. Kemudahan Penyajian Pajak Penghasilan (PPh) bagi Pengusaha UMKM dengan SAK ETAP. *Pamator*. 4: 2.